



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

Kotabumi, 13 Agustus 2024

SOSIALISASI OPTIMALISASI PERAN, TUGAS & FUNGSI BPK DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung



CURRICULUM VITAE



Riwayat Jabatan:

Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan Provinsi Aceh

Riwayat Pendidikan:

S2 Akuntansi Universitas Gajah Mada
S1 Akuntansi Universitas Indonesia
D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung

SALAM SABURAI

(Sinergi, Akuntabel, Bebas, Unggul, Responsif, Andal dan Inovatif)



AGENDA

- 1. Gambaran Umum**
- 2. Pemeriksaan BPK**
- 3. Hasil Pemeriksaan BPK**
- 4. Permasalahan Dana Desa**

Gambaran Umum

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Pengertian dan Tujuan

Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan:

- Mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelaksanaan pembangunan; dan
- Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;

Sumber : PP Nomor 37 Tahun 2023

Alokasi Dana Desa (ADD)

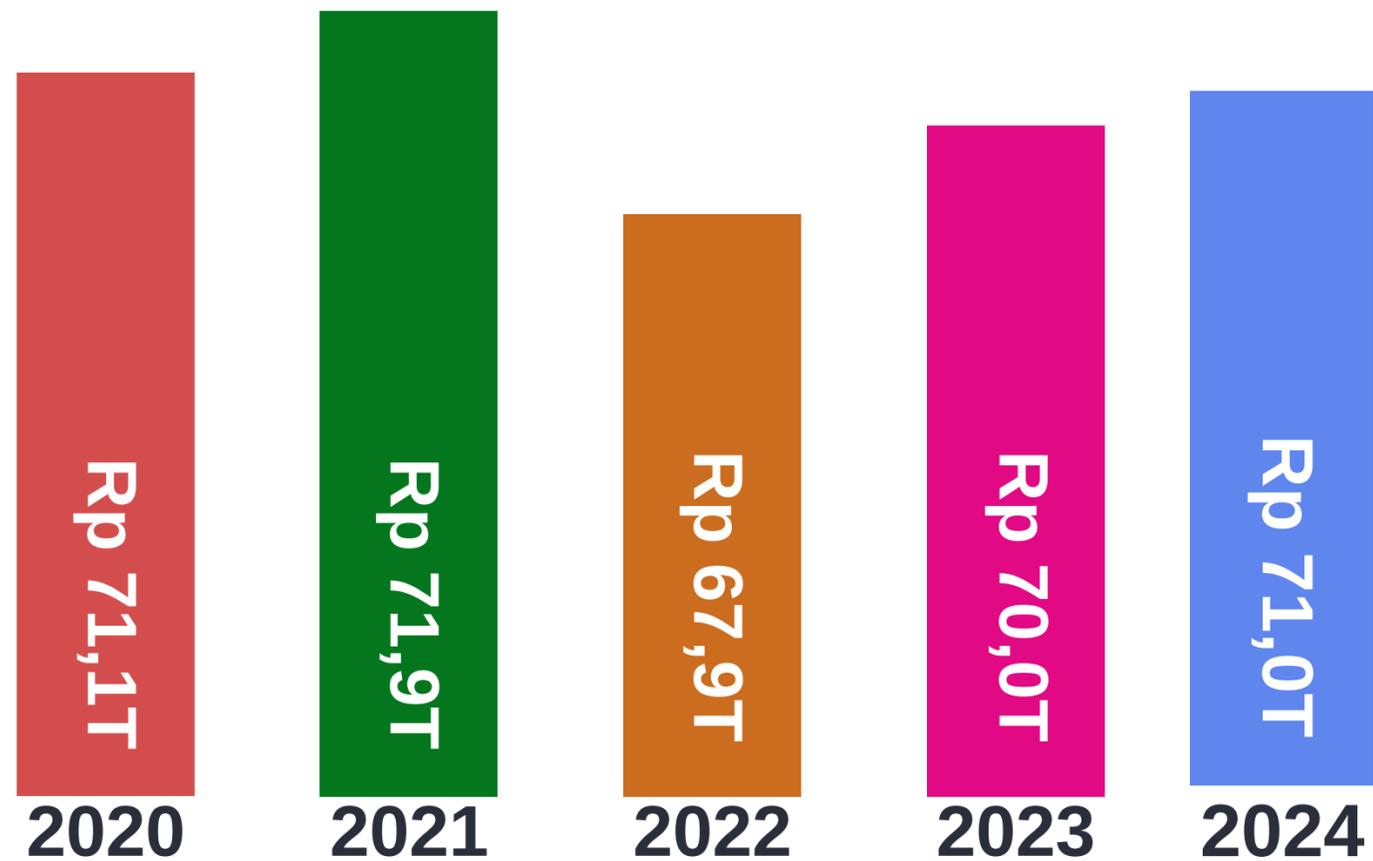
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dengan besaran alokasi minimal sebesar 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam APBD Kabupaten dengan tujuan:

- Membiayai penghasilan tetap bagi kepala dan perangkat Desa;
- Mengurangi angka kemiskinan Desa; dan
- Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Desa.

Sumber : UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 43 Tahun 2014

Dana Desa dalam APBN

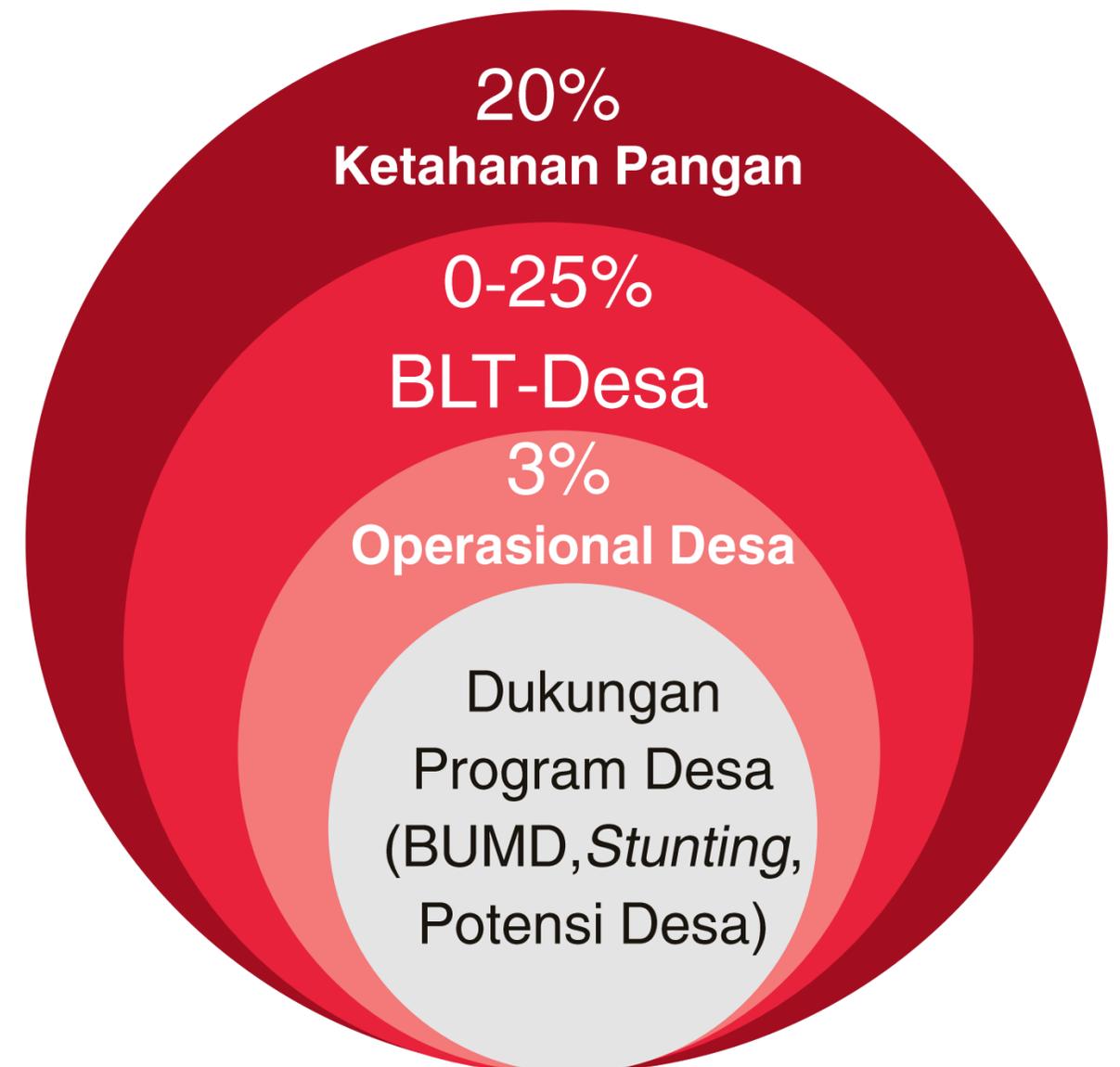
Dana Desa melalui APBN
2020-2024



Nilai dana desa tahun pertama 2015 adalah Rp9,06 Triliun

Sumber : dataindonesia.id dan PMK 146 Tahun 2023

Prioritas Dana Desa 2024



Sumber : PMK Nomor 146 Tahun 2023

Prioritas Dana Desa 2024

Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani (20%)

Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan

- Pengadaan bibit atau benih
- Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih
- Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan
- Pengembangan pakan ternak alternatif
- Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa

Pembangunan dan Pengelolaan lumbung pangan desa

- Pembangunan lumbung pangan desa
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air

Pengolahan pasca panen

- Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen
- Pelatihan pengelolaan hasil panen
- Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa

BLT –DD (0-25%)

Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa

Operasional Desa (3%)

Dana untuk menunjang tugas-tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, sosial dan budaya wilayah desa seperti **biaya koordinasi, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan biaya kegiatan khusus lain**

Dukungan Program Sektor Prioritas di Desa

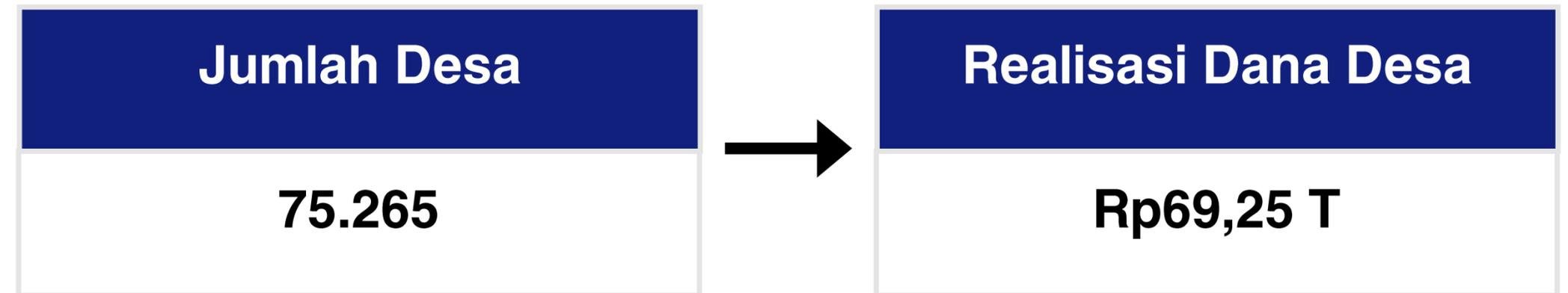
- Bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa
- Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa
- Pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa
- Program atau kegiatan lain

Dana Desa dalam APBN



Pengalokasian anggaran dana desa melalui APBN TA 2024 meningkat **1,43%** jika dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut merupakan **komitmen nyata Pemerintah dan DPR** untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa

Realisasi Anggaran Dana Desa Nasional



Sumber : <https://sid.kemendes.go.id/>
per 5 Agustus 2024



DANA DESA DAN ADD KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pemerintah Desa pada Kabupaten Lampung Utara telah menerima Dana Desa sebesar Rp175,21 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp48,90 miliar sampai dengan 5 Agustus 2024 untuk 232 Desa di 23 Kecamatan.

Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Dana Desa



PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMERIKSAAN LKPD

Tujuan

- Menguji asersi keterjadian penerimaan
- Menguji ketepatan nilai dan waktu
- Menguji kepatuhan tata cara penyaluran
- Menguji ketertiban Pemdes menyampaikan LPJ kepada Pemkab
- Menguji kepatuhan Pemkab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dana desa melalui Inspektorat

Sasaran

Pemahaman SPI pengelolaan keuangan desa dan keyakinan atas kewajaran penyajian dan pengungkapan akun belanja bantuan keuangan

Lingkup

Akun Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten

Ikhtisar Laporan Dana Desa menjadi lampiran LKPD, berupa LRA gabungan dari Pemerintah Desa

PEMERIKSAAN KINERJA

TEMATIK ATAS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DD & ADD TA 2018

TUJUAN

Menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan oleh Pemkab: **Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran dan Tanggamus**

SASARAN

Pembinaan:

- Regulasi dan kebijakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD;
- Perencanaan pembinaan pengelolaan DD dan ADD;
- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD dan ADD; dan
- Pelaporan serta monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD dan ADD.

Pengawasan:

- Regulasi tentang pengawasan DD dan ADD;
- Perencanaan pengawasan DD dan ADD;
- Pelaksanaan pengawasan DD dan ADD; dan
- TLH pengawasan DD dan ADD

LINGKUP

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, melalui:

- DPMD/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau sebutan lain);
- Inspektorat; dan
- Kecamatan dan OPD lain

PEMERIKSAAN KEPATUHAN

ATAS

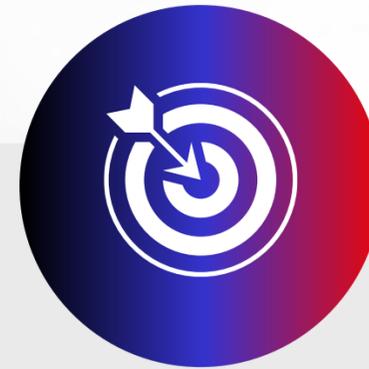
PENGELOLAAN PROGRAM PERLINSOS MELALUI

BLT DESA TA 2022



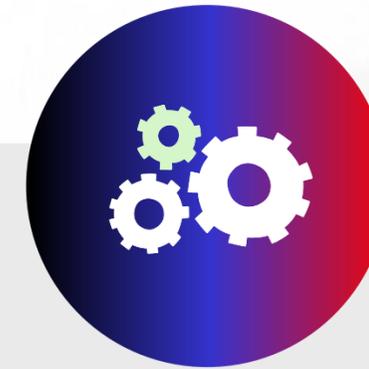
TUJUAN

Menilai pengelolaan program perlinsos melalui BLT telah mematuhi ketentuan yang berlaku pada Pemkab Lampung Tengah



SASARAN

- Pendataan
- Penganggaran
- Penyaluran
- Pembinaan dan Pengawasan



LINGKUP

Pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa



Hasil Pemeriksaan BPK **atas** **Pengelolaan Dana Desa**

Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

Pemeriksaan KINERJA

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada empat entitas:

- Kabupaten Tanggamus
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Lampung Selatan

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA 4 ENTITAS DI PROVINSI LAMPUNG

Temuan Pembinaan

- Kec. dan OPD yang ditunjuk belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD;
- Kec. Dan OPD yang ditunjuk belum melaksanakan pembinaan penggunaan DD dan ADD secara memadai;
- Kec. dan OPD yang ditunjuk belum melakukan pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD secara memadai;
- Kec. dan OPD yang ditunjuk belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD;
- Camat belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD; dan
- Hasil pengawasan Camat dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk belum memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan.

Temuan Pengawasan

- Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD dan ADD sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan;
- Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pengujian/ evaluasi atas penatausahaan DD dan ADD serta belum melakukan reviu atas pengoperasian siskeudes oleh perangkat desa; dan
- Laporan hasil pengawasan belum dikomunikasikan kepada Pemerintah desa sebagai bahan perbaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

PDTT KEPATUHAN

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui BLTDD TA 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah **Kabupaten Way Kanan**
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) TA 2022 pada Pemerintah **Kabupaten Lampung Tengah**



HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN

Aspek Pendataan

- a. Penyaluran BLT Desa berduplikasi dengan bansos lain yang bersumber dari APBN sehingga tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan;
- b. Persiapan dan pelaksanaan pendataan belum sesuai ketentuan.

Aspek Penganggaran

- a. Dana Desa yang masih tersimpan tidak dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program prioritas Dana Desa;
- b. Alokasi Anggaran BLT Desa tidak sesuai ketentuan.

Aspek Penyaluran

- a. Risiko salur tidak tepat sasaran BLT Desa dan terdapat indikasi kerugian penyalahgunaan dana salur BLT Desa oleh penyelenggaraan kegiatan pengelolaan BLT Desa;
- b. Penyaluran BLT Desa tidak sesuai ketentuan

Aspek Pembinaan dan Pengawasan

- a. Belum terdapat juknis secara lengkap terkait mekanisme pelaksanaan program perlinsos melalui BLT Desa. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BLT Desa tidak dapat segera diidentifikasi dan dilakukan perbaikan
- b. Kepala Daerah belum melaksanakan pembinaan dan pengawasan BLT Desa secara memadai

Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

PDTT

INVESTIGATIF

No.	Entitas	Tahun Anggaran Pemeriksaan	Desa/Kampung	Status
1.	Kabupaten Way Kanan	2017	Kampung Tanjung Kurung	Selesai
2.	Kabupaten Lampung Tengah	2019	Kampung Ngestirahayui	Selesai
3.		2020	Kampung Riau Periangan	Selesai
4.	Kabupaten Mesuji	2017	Desa Rejo Mulyo	Selesai
5.	Kabupaten Lampung Utara	2017	Desa Taman Jaya	Selesai
		2017	Desa Madukoro Baru	Selesai
		2018	Desa Talang Jembatan	Selesai
6.	Kabupaten Tanggamus	2017	Pekon Kayu Hubi	Selesai
7.	Kabupaten Lampung Barat	2017	Pekon Sukamulya	Selesai

Permasalahan atas Pengelolaan Dana Desa



PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes)



- 1. Kepala Desa dalam pengelolaan dana APBDes tidak menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);**
- 2. Kegiatan pengelolaan barang/jasa untuk pelaksanaan pembangunan desa oleh Kepala Desa tidak sepenuhnya diserahkan ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);**
- 3. Proses Konsolidasi, verifikasi dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD tidak sesuai ketentuan;**
- 4. Dana APBDes dikuasai oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa;**
- 5. Terdapat penyaluran BLT DD kepada KPM yang tidak memenuhi kriteria kepada KPM yang telah menerima bantuan lain dari APBN; dan**
- 6. Penyaluran BLT DD tidak tepat waktu.**

PERMASALAHAN DALAM

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes)



1. Bukti pembayaran dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran yang sebenarnya;
2. Jumlah barang tidak sesuai dengan bukti pembayaran;
3. Bukti pembayaran tidak *riil*;
4. Kekurangan volume hasil pekerjaan fisik;
5. Pertanggungjawaban BLT DD tidak lengkap;
6. Pencairan BLT DD diterima pihak lain tanpa surat kuasa; dan
7. Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLT DD.

Daerah > Jateng > Detail Berita

Mantan Kades di Kudus Tersangka Dugaan Penyimpangan Dana Desa Rp1,8 Miliar

Sonin, 12 Jul 2021 - 20:39:00 WIB

Antara



Mantan Kepala Desa Lau HS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan penggunaan dana desa (Foto: iustisia/ist)

KUDUS, iNews.id - Mantan Kepala Desa Lau HS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan penggunaan **dana desa** pada tahun anggaran 2018/2019 dengan nilai kerugian berkisar Rp1,8 miliar. Saat ini HS ditahan di **Polres Kudus**.

Kejari Brebes limpahkan kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tipikor

Jumat, 28 Juni 2024 11:20 WIB



Kejaksaan Negeri Brebes menyelenggarakan konferensi pers kasus tindak pidana korupsi dana dengan tersangka Kepala Desa Jatimakmur di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024). ANTARA/Kejari Brebes

detiknews

Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak-blakan Pro Kontra Adasari Terpopuler Daerah Hoax or Not Suara Pembaca Pemilu 2024

Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, 2 Kades di Serang Segera Disidang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
10 June, 09 Jul 2021 11:09 WIB



Ilustrasi korupsi (Lib: Widyayati/Wikimedia)

radar Lombok.co.id

Portal Berita NTB Terdepan dan Terpercaya

Home Daerah Derap Nusantara Wisata Features Headline Nasional Politik Pendidikan Krim

Mantan Kades Gemel Dituntut Tujuh Tahun Penjara

6 Agustus 2024

Like 2
Facebook X Twitter WhatsApp Telegram



Polisi Amankan Mantan Kades di Malang, Diduga Terlibat Korupsi Alokasi Dana Desa

@ POLRES MALANG 17/05/2024 11:08 198



Kasus Dana Desa di Indonesia

Permasalahan Pengelolaan Dana Desa dari Berbagai Sumber



Permasalahan Dana Desa di Kab. Lampung Utara

- Korupsi Dana Bumades tahun 2019-2021 sebesar Rp1,2 Miliar oleh Kepala Desa Kinciran (CNNIndonesia.com pada Rabu 5 Oktober 2022)
- Penggunaan DD dan ADD tahun 2018 tidak sesuai peruntukan serta tak dapat dipertanggungjawabkan pada Desa Way Melan (lampung.inews.id pada Kamis, 15 Juli 2021)
- *Mark up* harga dan pelaksanaan kegiatan fiktif tahun 2017 pada Desa Talang Jembatan (rilis.id pada Rabu, 19 Februari 2020)
- Pembelian lahan atau tanah pasar desa tahun 2018 menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp280 juta pada Desa Gunung Besar (lampung.inews.id pada Selasa, 19 Oktober 2021)

**Waterboom Mini Tirta CMJ BUMDes
Cimentengjaya Penggerak Ekonomi Desa
Desa Cimentengjaya,Lebak, Banten**



**Tiada Rumah Tanpa Kolam
Desa Koto Mesjid, Kampar, Riau**



**Jembatan Tua Itu, Kini Hanya Kenangan
Desa Sukamaju, Lampung Utara, Lampung**



**Café Balita Menebar Pesona
Desa Ko'mara, Takalar, Sulawesi Selatan**



Dana Desa

*Keberhasilan Pengelolaan
Dana Desa*

Sumber : Kisah Sukses Dana Desa DJPb



0813-6969-4488

UNTUK PENGADUAN DANA DESA DAPAT
MENGHUBUNGI **HOTLINE**
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



**BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Lampung

Salam SABURAI

(**S**inergi, **A**kuntabel, **B**ebas, **U**nggul, **R**esponsif, **A**ndal dan **I**novatif)

Terima Kasih